

LKJIP

*T
A
H
U
N*

2025



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun LKjIP ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Koto Baru, Februari 2026

Kepala DPPKBP3A



dr.Maryeti Marwazi.Mars

NIP. 196710172002122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2025 ini menjabarkan hasil kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2025 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yaitu "***Terwujudnya Pemerintah yang Melayani menuju masyarakat Madani Nan Sejahtera***" Tujuan utama Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan gender dan perlindungan anak.

Pada Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Solok telah melaksanakan 9 Program dan 20 Kegiatan dan 47 Sub.Kegiatan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.11.378.474.659(Sebelas Milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp9.448.887.245,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 90,25 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2025 dinyatakan "berhasil" dari target yang ditetapkan. Tahun 2025 pengukuran kinerja dilakukan melalui 3 sasaran strategis 1.Terwujudnya keluarga yang berkualitas.2. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan 2 indikator kinerja Tujuan dan 9 Indikator sasaran sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas ini didasarkan pada penggabungan Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan pertimbangan akan menjadi daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan nasional khususnya dibidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2025 ini, secara keseluruhan memaparkan berbagai keberhasilan, termasuk kendala dalam mencapai Sasaran Strategis. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi di masa yang akan datang dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi serta sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dinas/instansi terkait dan Lembaga Masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk :

1. Penyusunan perencanaan yang tepat, meliputi ketepatan penganggaran, tepat sasaran, tepat program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD.
2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan lembaga dan instansi terkait.
3. Penambahan sarana dan prasarana berupa elektronik maupun non elektronik untuk menunjang operasional kegiatan.
4. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.
5. Perlu Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan program serta penambahan SDM lini lapangan. Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis capaian target indikator sasaran akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarnya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Koto Baru, Februari 2026
Kepala DPPKBP3A



dr.Maryeti Marwazi.Mars

NIP: 196710172002122001

DAFTAR ISI

Daftar Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

BAB I .PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi DPPKBP3A	1
1.3	Isu Trategis	10
1.4	Jumlah Pegawai	10
1,5	Landasan Hukum	14
1,6	Sistemtika laporan kinerja instansi pemerintah	15

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis 2025-2029	17
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
2.4	Perencanaan Anggaran Tahun 2025	27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Kinerja Organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
B.	Sasaran Strategis 1	37
1.	UHH (Usia Harapan Hidup)	37
2.	Indek Pembangunan Keluarga	40
3.	Indek Lansia Berdaya	40
4.	Indek Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	43
4	Indikator kinerja persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri	48
5	Indikator kinerja indek pembangunan gender (IPG)	51
6	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	58
B.	Capaian kinerja berdasarkan rentra tahun 2021-2026	67

BAB IV. PENUTUP

4.1	Kesimpulan	105
4.2	Srategi dimasa Mendatang	105

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelami Tahun 2025	11
Tabel 2.2.	Jumlah ASN DPPKBP3A Berdsarkan Golongan Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Komposisi ASN DPPKBP3A Bedasrkan tingkat pendidikan Tahun 2025 .	12
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBP3A Tahun 2025	12
Tabel 3.1	Vivi Tujuan, Saran ,Strategi Arah Kebijakan,Program DPPKBP3A Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPPKBP3A	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja sasaran kinerjaindikator kinerja satuan dan target	27
Tabel 2.4	Perjanjian kinerja sasaran, strategi indikator program beserta pagu	28
Tabel 3.1	Penetapan kinerja Perangkat daerah tahun 2025 dan indikator utama	34
Tabel 3.2	Perbandingan antara target den realisasi tahun ini	36
Tabel 3.1	Usia harapan Hidup	37
Tabel 3.2	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu	38
Tabel 3.3	Perbandingan Usia Harapang Hidup	40
Tabel 3.5	Indek Pembangunan Keluarga	40
Tabel 3.6	Indek Lansia Berdaya	41
Tabel 3.7	Indek lansia berdaya	42
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi dan Evektivitas anggaran indikaror indek lansia berdaya	42
Tabel 3.9	Perbandingn Target dengan realisasi	44
Tabel 3.12	Indek pengasuhan keluarga yang memilki remaja	46
Tabel 3.13	Realiasi pencapaian peningkatan anggaran maksimal kebutuhan masyarakat	48
Tabel 3.14	Kampung keluarga berkualitas	49
Tabel 3.15	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	49
Tabel 3.14	Indek pembagunan gender (IPG)	54
Tabel 3.15	Indek pembangunan gender (IPG)	54
Tabel 3.16	Indek ketimpangan gender (IKG)	59
Tabel 3.17	Indek ketimpangan gender (IKG)	60
Tabel 3.18	Tingkat Efisiensi dan efektifitas sumber daya indeks ketimpangan gender	61

Tabel 3.19	Indek perlindungan anak	61
Tabel 3.20	Indek perlindungan anak	63
Tabel 3.21	Indek perlindungan anak	63
Tabel 3.2	Rencana Kinerja DPPKBP3A	68
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja utama (IKU) DPPKBP3A tahun 2025	69
Tabrl 3.4	ASFR Kabupaten Solok	70
Tabel 3.3	Angka kelahiran Total (TFR)	71
Tabel 3B.4	Perbandingan Realusasi Indikator kinerja TFR tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	71
Tabel 3.B5	Angka Kelahiran Total TFR	72
Tabel 3.B.6	Angka kelahiran Total TFR	72
Tabel 3.B.6	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Angka Kelahiran total TFR	74
Tabel 3.B.7	Pencapaian indikator kinerja sasaran persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	77
Tabel 3.B.8	Perbandingan Realisasi indikator kinerja unmet need tahun 2025-dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir	78
Tabel 3.B.9	Perbandingan realiasi kinerja dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan renstra	79
Tabel 3.B8	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	79
Tabel 3.B9	Capaian kinerja dari sasaran	82
Tabel 3.B10	Persemtase perempuan produktif	84
Tabel 3.13	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya indikator kinerja persentase perempuan yang produktif dalam ekonomi keluarga	86
Tabel 3.B9	Pencapaian kinerja sasaran 2 persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tahun 2025	88
Tabel 3.B10	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terkhir	89
Tabel 3.B11	Tingkat efisiensi dan efektivitas persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instnsi terkait	91
Tabel 3.10	Persentase kinerja sasaran 3 skorevel KLA tahun 2025	93
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi indikator kinerja skor KLA tahun 2025 dengan tahun 2024 dan bebrapa tahun terakhir.....	93

Tabel 3B.13 Indikator KLA 95

Tabel 3B.14 Tingkat efisiensi dan evektifitas KLA

Tabel 3.C1 Realisasi anggaran program kegiatan /Sub kegiatan DPPKBP3A 97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran Sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

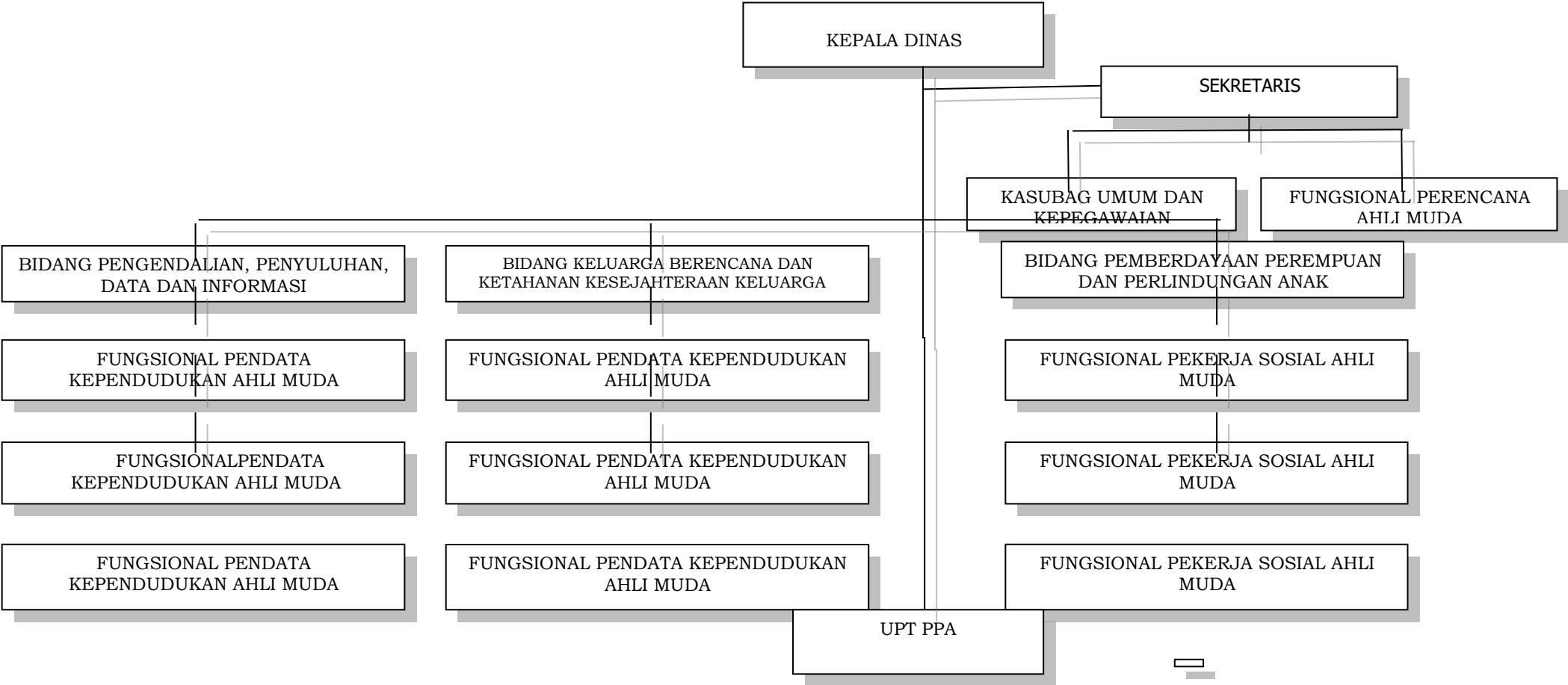
Sesuai dengan Peraturan Daerah No.45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Tugas dan fungsi serta tata Kerja Diinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang terdiri dari :

- Kepala
- Sekretariat terdiri dari:
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Fungsional Perencana
- Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan data dan Informasi terdiri dari fungsional yaitu :
 - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
 - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
 - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
- Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari fungsional yaitu :
 - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
 - - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
 - - Fungsional PENDATA KEPENDUDUKAN AHLI MUDA
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari fungsional :
 - FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
 - FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
 - FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
- UPT PPA terdiri dari :
 - Kepala UPT
 - Tata usaha UPT

Dalam menjalankan tugas fungsi Dinas Pengendalian Penduduk mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Sesuai Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tugas dan fungsi serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut

A. Kepala Dinas

- Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas perbantuan yang diberikan oleh daerah.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

B. Sekretariat

- Tugas

Mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

- Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dinas
- Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan ganti rugi
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- Tugas

Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga kehumasan, protokol dan tatalaksanaan serta kepegawaian

- Fungsi

- Pengelolaan kepegawaian
- Pengelolaan urusan tata usaha dan kersipan
- Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
- Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan pemeliharaan barang Dinas
- Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah.
- Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub. bagian umum dan kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

- Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

- Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, system informasi keluarga penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian dan keluarga berencana.
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, system informasi keluarga penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian penduduk system informasi keluarga penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian kuantitas penduduk.
- Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk
- Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk system informasi keluarga, penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian dan keluarga berencana
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

- Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan serta pelaporan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- Fungsi

- Penyiapan oerumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana ,ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja.
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha makro keluarga

- Pelaksanaan kesertaan ber KB
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana, ketahanan kesejahteraan keluarga.
- Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Tugas

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

F. UPT

Unit pelaksana teknis PPA mempunyai tugas Menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan,perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan Khusus.dalam menyelenggarakan penanganan,perlindungan dan pemulihan korban maka UPTD PPA bertugas sebagai berikut :

- Menerima laporan atau penjangkauan korban
- Memberikan Informasi tentang hak korban
- Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- Memfasilitasi pemberian layanan psikososial rehabilitasi social,pemberdayaan social dan reintegrasi social
- Menyediakan layanan hukum
- Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera.
- Memfasilitasi kebutuhan korban disabilitas
- Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya

- Memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses secara peradilan.

1.3 Isu Strategis

Isu-isu penting atau isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut :

- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi difasilitasi kesehatan /klinik pelayanan KB
- Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum maksimal
- Belum tersedianya data Representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurangnya tenaga penyuluh disetiap kecamatan
- Masih adanya keluarga beresiko stunting
- Masih rendahnya capaian Pelayanan KB pasca salin
- Masih rendahnya minat perempuan dan anak dalam keterlibatan pembangunan

1.4 Jumlah Pegawai

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparaturnya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2025 sebanyak 30 orang sedangkan pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 25 orang. Sepanjang Tahun 2025 terjadi mutasi dan pensiun pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala DPPKBP3A	0	1	1
2	Sekretariat	0	7	7
3	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi	1	4	5
4	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	5	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	4
6	UPT PPA	1	2	3
	Total	4	21	25

Aparatur DPPKBP3A jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah yang laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan dari laki-laki, dimana aparatur laki-laki berjumlah 4 orang atau 16 % dan perempuan sebanyak 21 orang atau dari 84 % aparatur yang ada. Kondisi ini bisa diakibatkan oleh kondisi kerja di DPPKBP3A yang membutuhkan tingkat ketelitian dan ketekunan terutama dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan juga memerlukan aparatur laki-laki, sehingga kebutuhan aparatur perempuan dan laki-laki tidak berimbang. Komposisi ASN berdasarkan golongan dapat dilihat dari tabel dibawah :

Tabel 2.2
Jumlah ASN DPPKBP3A Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	2	4	6
2	Golongan III	1	16	17
3	Golongan II	1	1	2
	Jumlah	4	21	25

Berdasarkan golongan, aparatur DPPKBP3A didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 60%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 2 orang atau sebesar 17,14%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena

masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III.

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPPKBP3A berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Komposisi ASN DPPKBP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jurusan	L	P	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	-	-	-	
2	SMP/Sederajat	-	-	-	
3	SMA/Sederajat	1	1	2	8 %
4	D-3		3	3	12 %
5	S1	1	14	15	60 %
6	S2	2	3	5	20 %
	JUMLAH	4	21	25	100 %

Aparatur DPPKBP3A berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 60 %. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPPKBP3A ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPPKBP3A secara umum. Adapun komposisi aparatur DPPKBP3A berdasarkan tingkat

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPPKBP3A saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPPKBP3 Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Mobil Operasional	Unit	V		3 Unit
2	Mobil Penerangan	Unit	V		1 Unit
3	Mobil Antar Jemput Akseptor	Unit	V		1 Unit
4	Mobil Box Alkon	Unit	V		1 Unit

5	Sepeda Motor	Unit	V		76 Unit
6	Lemari besi	Buah	v		16 Buah
7	Papan Nama	Buah	V		1 Buah
8	Filling Cabinet Besi	Buah	v		16 Buah
9	CCTV	Unit	V		1 Unit
10	Papan Nama Instansi	Buah	V		1 Buah
11	Meja Kerja Kayu	Buah	V		9 Buah
12	Meja Rapat	Buah	V		7 Buah
13	Meja 1/2 biro	Buah	V		13 Buah
14	Kasur/Spring Bed	Buah	V		1 Buah
15	Kursi Tamu	Buah	V		1 Buah
16	Kursi putar	Buah	V		2 Buah
17	Sofa	Buah	V		5 Buah
18	Lemari Es	Unit	V		1 Unit
19	AC Window	Unit	V		5 Unit
20	AC Spilit	Unit	V		4 Unit
21	Sound System	Unit	V		1 Unit
22	Wireless	Unit	V		9 Unit
23	Gordyn/Kray	Buah	V		1 Buah
24	Karpec	Buah	V		1 Buah
25	Pecah Belah	Lusin	V		1 Lusin
26	Pecah Belah	Lusin	V		1 Lusin
27	Alat Pembantu Kebakaran	Buah	V		1 Buah
28	Kursi Kerja Pejabat ESelon II	Buah	V		1 Buah
29	Lemari Buku Arsip	Buah	V		5 Buah
30	Slide Projector	Buah	V		31 Buah
31	Lensa Kamera	Buah	V		1 Buah
32	Telephone Mobile	Buah	V		34 Buah
33	Personal Komputer	Buah	V		2 Buah
34	Alat Peraga Praktek Sekolah	Buah	V		2 Buah
35	Thermometer	Buah	V		1 Buah

36	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	V		1 Buah
37	Personal Komputer	Buah	V		42 Buah
38	Laptop	Unit	V		27 Unit
39	Note Book	Unit	V		13 Unit
40	Printer	Unit	V		38 Unit

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2025 adalah sebanyak 30 orang sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 26 orang. Sepanjang Tahun 2025 terjadi mutasi dan pensiun pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.2.

1.5.Landasan Hukum

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 28 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih bebas korupsi,kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang N0.23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2027 tentang urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada : Latar belakang, Tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis, jumlah pegawai, landasan hukum

Bab II. : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang, Rencana Strategis, Indikator kinerja utama dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2025 Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Sub.Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Pada sub.bab ini diuraikan capaian kinerja yang telah dicapai berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada sub.bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah dinas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, adapun Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Misi 3 yaitu : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata.

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang dan bagian di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun stake holder eksternal. Secara ringkas sub.tansi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diilustrasikan sebagai berikut:

2.1.1.Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

"TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT M
ADANI NAN SEJAHTERA ."

2.1.2.Misi

Misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

- 1. Meningkatnya derajat dan kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan yang merata

2.2.3.Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

- 1.Meningkatnyaketahanan keluarga ,kesetaraan gender dan perlindungan anak

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2025-2029,adapun sasaran yang akan dicapai ada

- 1. Terwujudnya keluarga yang berkualitas
- 2. Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini yang memuat Visi Misi Tujuan ,Sasaran ,Strategi ,arah kebijakan Tabel.3.

Tabel 3.1. Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program DPPKBP3A dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Visi 3	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatnya derajat dan kesehatan masyarakat dan kualitas	Meningkatnya ketahanan keluarga ,kesetaraan gender dan	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Memperkuat pengendalian penduduk	Mengembangkan Gran Desig pembangunan kependudukan

pendidikan yang merata	perlindungan anak			
			Meningkatkan akses penyelenggaraan KB/KR secara Komprehensif	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan jangkauan KB/KR
			Memperbanyak kampung keluarga yang berkualitas	Peningkatan penguatan kualitas keluarga
			Melaksanakan pendataan keluarga pencatatan dan pelaporan kependudukan	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga
			Meningkatkan tribina UPPKS	Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan SDM
			Mensosialisasikan sekolah berwawasan kependudukan	Peningkatan akses dan kualitas layanan bina keluarga
				Penguatan ketahanan ekonomi keluarga
				Penguatan system informasi, pembangunan keluarga berwawasan kependudukan
				Peningkatan pembangunan keluarga berwawasan kependudukan
		Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak	Mengurangi kesenjangan gender	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui Kebijakan dan Program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan Perempuan
			Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
			Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatkan capaian Kabupaten layak anak
			Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik social dan budaya	Mengoptimalkan pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak
			Meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan keterampilan	Melakukan sosialisasi serta pelatihan industry rumahan bagi perempuan
			Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif	
			Memperkuat sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data gender	

2.2.Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintah yang

baik di Indonesia, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Pengertian Indikator	Formulasi Indikator
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
		Indeks pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga di Indonesia	Nilai iBangga dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmetik dari ketiga indeks di atas. Nilai iBangga berkisar antara 0 hingga 100, dengan : Kurang Baik (Rentan): Di bawah 40. Cukup Baik (Berkembang): Antara 40 hingga 70. Baik (Tangguh): Di atas 70
		Indeks Lansia berdaya	Indeks Lansia Berdaya (ILB) adalah ukuran komposit yang	ILB dibangun dari 3 dimensi utama, yaitu: 1. Sehat Kondisi kesehatan lansia (penyakit kronis, status gizi, keterbatasan fisik).

			dikembangkan oleh BKKBN untuk menilai tingkat keberdayaan lanjut usia (lansia) dalam berbagai aspek kehidupan. Indeks ini menjadi salah satu instrumen pembangunan keluarga, khususnya dalam melihat sejauh mana lansia masih dapat mandiri, produktif, sehat, dan berperan dalam lingkungan sosialnya	Akses terhadap layanan kesehatan. Perilaku hidup sehat. 2. Mandiri ▪ Kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain. ▪ Kemandirian ekonomi (memiliki penghasilan atau tabungan). ▪ Tingkat partisipasi dalam kegiatan rumah tangga 3. Produktif ▪ Partisipasi lansia dalam kegiatan sosial masyarakat. ▪ Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi atau usaha produktif. ▪ Kontribusi terhadap keluarga, misalnya mengasuh cucu atau membantu pekerjaan rumah
		Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki Remaja	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (IPK-Remaja) adalah indikator komposit yang disusun oleh BKKBN untuk mengukur kualitas pengasuhan	Indeks ini dibangun dari 3 dimensi pengasuhan, yaitu: Pengasuhan Asah (Kognitif dan Pendidikan) Orang tua mendorong remaja untuk sekolah/pendidikan. Orang tua menyediakan fasilitas belajar. Orang tua mendampingi kegiatan belajar remaja. • Pengasuhan Asih (Kasih Sayang & Psikologis) Keharmonisan hubungan orang tua-remaja.

			keluarga terhadap anak usia remaja (10–24 tahun, belum menikah).	• Orang tua mendengarkan pendapat/cerita remaja. • Orang tua menunjukkan perhatian dan dukungan emosional. • Pengasuhan Asuh (Perlindungan & Kesehatan) Orang tua mengawasi pergaulan remaja. • Orang tua memberi arahan tentang bahaya narkoba, rokok, pernikahan dini. • Orang tua memastikan remaja mendapat layanan kesehatan (termasuk kesehatan reproduksi remaja)
		Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mencapai tingkat kemandirian terhadap total Kampung KB yang ada di suatu daerah	Persentase Kampung KB Mandiri= $\frac{\text{Jumlah seluruh Kampung KB}}{\text{Jumlah Kampung KB Mandiri}} \times 100\%$

		Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indek Pembangunan Gender (IPG) suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah IPG mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam beberapa aspek seperti: Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Partisipasi politik IPG bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender	Perempuan+Indeks Ekonomi Perempuan + indeks Partisipasi Politik Perempuan /4
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks ketimpangan gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$

			indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\ 20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan
--	--	--	---	--

				G_p = Indeks Perempuan G_l = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_l = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_l = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_l$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM(G_p, G_l) = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{15} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
		Indeks perlindungan anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak dalam suatu negara atau wilayah indeks ini mempertimbangan beberapa aspek, seperti : 1. Kesehatan dan kesejahteraan anak 2. Pendidikan dan pengembangan anak 3. Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi 4. Partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan	$IPA = 0,3 \text{ (Kekerasan Anak)} + 0,2 \text{ (Eksplorasi Anak)} + 0,2 \text{ (Akses Layanan)} + 0,3 \text{ (Kualitas Sistem)}$
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai saki Perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja).

	perangkat daerah		adalah hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	• Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
--	------------------	--	--	---

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini :

Tabel : 2. 3 Perjanjian Kinerja ,Sasaran Kinerja Indikator Kinerja ,Satuan dan target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Umur Harapan Hidup (UHH)/Tahun	Persen	73,58
	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70,10
	Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	60,5
	Indek lansia berdaya	Indeks	60,6
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Indeks	83,4
	Persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri	Persentase	95,5
Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Indeks	96,23
	Indeks ketimpangan gender (IPG)	Indeks	0,40
	Indeks perlindungan anak	Indeks	96,23
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	angka	76,11

2.4.Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk menunjang capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melaksanakan Program dengan Anggaran dapat dilihat dari tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis,Indikator Program beserta pagu

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	4.646.244.507.34
		Nilai Akuntabilitas	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.707.210.00
		Indeks Pembangunan Keluarga	Kegiatan administrasi Umum perangkat daerah	226.215.573.05
		Indeks lansia berdaya	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	72.035.693.00
		Indeks Pengasuhan remaja yang memiliki remaja	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	621.041.264.00
		Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	Kegiatan Administrasi Keuangan	3.664.244.767.20
			Program Pengendalian Penduduk	520.703.788,90
			Kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas Penduduk	183.684.592.00
			Kegiatan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabupaten.Kota	337.019.196.90
\			Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.367.141.349.00
			Kegiatan pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya lokal	1.305.875.125.00
			Kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota	1.076.509.816.00
			Program Pemberdayaan dan	1.628.169.999.90

			Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Kegiatan pelaksanaan pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	301.929.999.90
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga	1.326.239.999,90
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	43.618.000.00
			Kegiatan pelebagaan Pengerusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan kabupaten/Kota	43.618.000.00
		Indeks Ketimpangan Gender	Program Perlindungan Perempuan	735.517.361.96
			Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	8.589.000.00
			Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	105.433.204.00
			Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	621.495.157.96
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	69.987.438.00
			Kegiatan Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak Tingkat daerah kabupaten /kota	69.987.438.00
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Pemenuhan hak anak	83.396.089.00
			Kegiatan Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah,Non pemerintah dan usaha Kewenangan Kabupaten/kota	53.036.534.00
			Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia laporan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	30.359.555.00

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Perlindungan Khusus Anak	283.696.125.00
			Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	92.911.000.00
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	156.235.999.00
			Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat daerah kabupaten/kota	34.549.126.00
	Jumlah			11.378.474.659,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk ,Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok, sebagaimana tertuang didalam indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan indikator kinerja Utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Adapun Program penunjang untuk mencapai keberhasilan Indikator tersebut terdapat 9 Program diantara nya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pemenuhan Hak anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana , Program Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bersumber pada dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik BOKB dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Untuk Program Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Anak bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik PPA dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain kegiatan pada Program tersebut diatas semuanya bersumber pada DAU APBD.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator makro diperoleh berdasarkan pengukuran indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran antar dasar indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan

dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang berupa keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik
4.	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	> 30-50	Agak kurang
6	D	0-30	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk angka capaian 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang.dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjunya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebob-sebob tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan ini ,Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan gambaran penilaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan,dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun renja. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang ditetapkan.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Utama dalam RPJMD 2025-2029. dengan rincian sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel. 3.1

Tabel 3.1
 Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indkator Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Umur Harapan Hidup (UHH)	Persen	73,58
		Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	70.10
		Indeks Pembangunan Keluarga	persen	60,5
		Indeks lansia berdaya	indeks	60.6
		Indeks pengasuhan remaja yang memiliki remaja	Indeks	83,4
		Persentase Kampung Keluarga berkualitas yang mandiri	Persen	95,5
	Meningkatnya	Indeks Pembangunan	indeks	96,23

	kesetaraan gender dan perlindungan anak	Gender (IPG)		
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,40
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	96,23
	Meningkatnya skuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat daerah	angka	76,11

Pada Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana terdapat target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diantaranya adalah :

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak adalah : Meningkatnya ketahanan keluarga,kesetaraan gender dan perlindungan Anak dengan indikator tujuan adalah

Umur Harapan Hidup (UHH) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai periode 2025-2029, diantara nya adalah :

- Terwujudnya keluarga yang berkualitas dengan indikator
 - Indeks Pembangunan Keluarga
 - Indeks Lansia berdaya
 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja
 - Persentase Kampung Keluarga berkualitas yang mandiri
- Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dengan indikator
 - Indeks pembangunan Gender (IPG)
 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator
- Nilai Sakip perangkat daerah

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2025-2029 tetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel : 3.2 .Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun ini

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Relaisasi
1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Umur Harapan Hidup (UHH)	Persen	73,58	72,82
		Indeks kualitas Pembangunan Keluarga	persen	60,5	61,4
		Indeks lansia berdaya	indeks	60.6	65,69
		Indeks pengasuhan remaja yang memiliki remaja	Indeks	83,4	78,27
		Persentase Kampung Keluarga berkualitas yang mandiri	Persen	95,5	100
	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	96,23	96,22
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,40	0,377
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	96,23	83,81

Sasaran Strategis 1.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terwujudnya keluarga yang berkualitas ditetapkan 6 (enam) Indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut :

1. UHH (Usia Harapan Hidup)

UHH adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang yang lahir pada suatu tahun tertentu dengan asumsi bahwa pola kematian pada tahun tersebut tetap sama sepanjang hidupnya.

UHH adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.UHH yang tinggi menunjukkan bahwa memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan,nutrisi dan lingkungan yang sehat sehingga dapat hidup lebih lama dan sehat.

Semakin tinggi usia harapan hidup disuatu daerah,menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat,termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun formulasi dari Indfikator UHH adalah : Idealnya dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Deat Rate/ASDR*) yang data nya diperoleh dari catatan registrasi kematian.Namun karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik,maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program For Demograpfi Analysis (MCPDA) atau Mortpack*.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun pencapaian Usia Harapan Hidup pada tahun ini dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Usia Harapan Hidup (UHH)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	UHH (Usia Harapan Hidup)	73,58	72,82	99 %

Sumber : Statistik

Berdasarkan tabel diatas 3.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator UHH tahun 2025 tidak tercapai dimana pencapaian kinerja UHH pada Tahun 2025 sebesar 99 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan capaian kinerja UHH tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table 3.2

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu

NO	Indikator Kinerj	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1	UHH (Usia Harapan Hidup)	NA	NA	72,82	NA	Na	99		

c. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten di Sumatera Barat

Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator Usia Harapan Hidup Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Usia Harapan Hidup

NO	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1	Usia Harapan Hidup	72,82		

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari uraian tersebut diatas dimana target UHH pada Tahun 2025 tidak tercapai ini disebabkan diantara nya adalah :

- Kecelakaan dan cidera kekerasan lalu lintas,kekerasan dan cidera lainnya dapat menyebabkan kematian yang lebih tinggi
- Penyakit tidak menular
Penyakit tidak menular seperti jantung,stroke dan kanker juga dapat menyebob kematian yang lebih tinggi.
- Perubahan iklim
- Kurangnya akses kesehatan terutama pada daerah pedesaan .
- Kemiskinan

Untuk mencapai peningkatan indikator tersebut alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akses kesehatan terutama akses kelayanan terutama didaerah pedesaan dan terpencil dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan meningkatkan layanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan, meningkatkan akses teknologi kesehatan.
- Pencegahan dan pengobatan penyakit ,meningkatkan pencegahan dan pengobatan penyakit terutama penyakit menular dan tidak menular .
- Meningkatkan gizi dan pangan
- Meningkatkan lingkungan yang sehat
- Meningkatkan program kesehatan ibu dan anak
- Meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait.

Sedangkan solusi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan layanan kesehatan
- Peningkatan akses layanan kesehatan
- Peningkatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan

e. Analisis atau efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

f. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai indikator Kinerja UHH Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dapat dengan melakukan :

1. Meningkatkan layanan kesehatan Reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat terutama bagi perempuan dan anak.
2. Program Keluarga Berencana untuk mengurangi angka kelahiran sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak
3. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan pelatihan dan kegiatan ekonomi sehingga mereka dapat memiliki sumber daya dan meningkatkan status social.
4. Perlindungan anak ,dengan meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan sejahtera
5. Meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait.
6. Pengumpulan data tentang kesehatan Reproduksi,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan

2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah ukuran yang digunakan untuk meniai tingkat perkembangan dan kualitas kehidupan keluarga secara komprehensif, Indeks Pembangunan Keluarga mengukur berbagai dimensi penting yang berkaitan dengan kondisi keluarga seperti kesehatan anggota keluarga pendidikan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi serta lingkungan keluarga yang mendukung

Adapun formulasi dari indeks Pembangunan keluarga adalah : nilai iBangga dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmetik dari ketiga indeks diatas.Nilai iBangga berkisar antara 0 hingga 100 dengan:

- Kurang Baik (Rentan) : dibawah 40
- Cukup baik (berkembang) diantara 40 hingga 70
- Baik (Tangguh) diatas 70.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Indeks Pembangunan Keluarga

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Keluarga			

3. INDEKS LANSIA BERDAYA

Indeks Lansia berdaya adalah pengukur tingkat kualitas hidup lansia berdasarkan konsep lansia tangguh yaitu lanjut usia yang tetap sehat,mandri,aktif,produktif dan bermartabat dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Indeks ini merupakan bagian program Lansia berdaya yang dikelola BKKBN untuk memastikan lansia tidak hanya bertambah usia tetapi juga tetap memiliki peran dan potensi. Adapun formulasi dari indeks Lansia Berdaya adalah penilaian dalam indeks ini umumnya mencakup lima pilar utama :

1. Sehat Kondisi kesehatan lansia (penyakit kronis,status gizi,keterbatasan Fisik) akses terhadap layananan kesehatan perilaku hidup sehat.
2. Mandiri Kemampuan lansia dalam melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain.Kemandirian ekonomi (Memiliki penghasilan atau tabungan,tingkat partisipasi dalam kegiatan rumah tangga.

3. Produktif Partisipasi lansia dalam kegiatan social masyarakat,keterlibatan dalam kegiatan ekonomi atau usaha produktif Kontribusi terhadap keluarga misalnya mengasuh cucu atau membantu pekerjaan rumah.

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun pencapaian dari Indeks lansia berdaya pada tahun 2025 dengan target 60,6 % dengan realisasi 65,7 % dengan capaian 108 % dalam artinya pencapaiannya baik. dapat dilihat dari tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Indeks Lansia Berdaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Lansia Berdaya	60,6	65,7	108 %

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

NO	Indikator Kinerj	Target			Realisasi			capaian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Lansia berdaya	NA	NA	60,6	NA	Na	65,7	NA	NA	108

c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

NO	Indikator Kinerj	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2030(Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1	Indeks Lansia berdaya	NA	NA	65,7	NA	NA	108	63,3	103

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks lansia berdaya Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Indeks Lansia Berdaya

NO	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1	Indeks lansia berdaya	65,7		

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dilihat dari uraian diatas dari target yang telah ditentukan 60,6 tercapai pada tahun 2025 sebanyak 65,7 persen maka pencapaiannya 108 persen ini berarti pencapaiannya baik dan berhasil

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya target indikator lansia berdaya adalah sebagai berikut :

1. Adanya program sekolah lansia
2. Adanya program pemberdayaan lansia yang efektif seperti kegiatan kegiatan social sehingga lansia dapat aktif dan produktif
3. Ketersediaan fasilitas dan layanan yang memadai seperti pusat kegiatan lansia,layanan kesehatan dan transportasi
4. Adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat yang kuat bagi lansia sehingga mereka merasa aman dan nyaman
5. Adanya layanan kesehatan dengan adanya layanan kesehatan dalam menangani lansia sehingga mereka dapat menerima perawatan yang memadai.
6. Penyuluhan dan pembinaan lansia

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks lansia berdaya dapat dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel. 3.8
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Lansia berdaya

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Lansia berdaya	60,6	65,7	108 %	130.000.000	129.415.000	99,55
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						0,45%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						1,085 %

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa Indikator Indeks Lansia berdaya pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 60,6 dan terealisasi sebesar 65,7 dengan capaian kinerja sebesar 108% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. dan terealisasi sebanyak Rp. 130.000.000 dengan capaian 99,55% dan terjadi efisiensi sebesar 0,45% maka didapat efektifitas 1,085 %

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Lasia Berdaya adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap lansia pada Nagari
- 2. Melaksanakan sekolah Lansia berdaya
- 3. Aktivitas sosial dan komunitas (Meningkatkan Interaksi) dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap lansia.

Contoh salah satu kegiatan Lansia Berdaya pada gambar dibawah ini :



Kegiatan Lansia pada kecamatan Danau Kembar

4.INDEKS PENGASUHAN KELUARGA YANG MEMILIKI REMAJA

Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja adalah indikator yang digunakan oleh BKKBN untuk menggambarkan kualitas pengasuhan orang tua atau keluarga yang berusia remaja (rentang 10-24 tahun). Indeks ini menjadi indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana keluarga mampu

memberikan perlindungan.pemenuhan hak anak dan bimbingan yang tepat bagi remaja dilingkungan nya.

Formulasi dari Indikator Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja dimana indeks ini dibangun dari 3 dimensi pengasuhan yaitu :

- 1. Pengasuhan asah (Kognitif dan Pendidikan)mana orang tua mendorong remaja untuk sekolah/menempuh jalur pendidikan,orang tua menyediakan fasilitas belajar,orang tua mendampingi kegiatan belajar remaja
- 2. Pengasuhan asih (Kasih Sayang & Psikologis) keharmonisan hubungan orang tua-remaja ,orang tua mendengar pendapat/cerita remaja,orang tua menunjukkan perhatiann dan dukungan emosional.
- 3. Pengasuhan asuh (Perlindungan & Kesehatan) orang tua mengawasi pergaulan remaja,orang tua memberikan arahan tentang bahaya narkoba,rokok,pernikan dini.

a.Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi Indikator Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja. Untuk tahun 2025 mempunyai target 83,4 % sedangkan realisasi 78,27 % dengan capaian kinerja 93 ,8 % sehingga realisasi nya tidak mencapai target untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 3.9
Perbandingan Target dengan Realisasi
Indikator Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

No .	Indikator Kinerja	Target	Realisas i	Capaian (%)
1	Indeks Pengasuhan keluarga yang memilki remaja	83,4	78,27	93,8

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			capaian		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	NA	NA	83,4	NA	Na	78,27	NA	NA	98,84

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target untuk indikator Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA

N o	Indikato r Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	NA	NA	78,27	NA	NA	98,84	88,4	88,54

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Adapun perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja

NO	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	78,27		

e.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indikator Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja tahun 2025 terdapat beberapa faktor **penghambat** serta solusi sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
 - Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pengasuhan remaja dalam keluarga
 - Keterbatasan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan remaja dalam keluarga
 - Teknogi dan media social penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan pengaruh konten media social seringkali menjadi tantangan baru yang sulit dibatasi oleh orang tua
 - Faktor lingkungan lingkungan pertemanan yang negative dapat merusak kontrol diri remaja jika pondasi pengasuhan di rumah lemah.
 - Masalah ekonomi keluarga dapat membatasi sumber daya untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan social remaja serta meningkatkan stress dalam keluarga.

Adapun solusi dan alternative serta solusi yang dilakukan untuk mencapai tercapainya indikator Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnyapegasuhan remaja dengan baik.
- b) Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan remaja melalui Bina keluarga remaja, Pik-R

- c) Peningkatan dukungan komunikasi dari lembaga terkait
- d) Peningkatan peran orang tua dalam memantau dan mendampingi remaja.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Bina Keluarga Remaja (BKR) kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok BKR di setiap nagari.
2. Melakukan penyuluhan pada kegiatan Bina keluarga Remaja sebagai wadah kegiatan kelompok bagi orang tua yang memiliki remaja untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan kelompok dalam membimbing tumbuh kembang anak secara positif
3. Penyuluhan kesehatan Reproduksi remaja
4. Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan
5. Penanam nilai moral, agama dan karakter
6. Pemenuhan gizi remaja dan pemantauan tumbuh kembang remaja
7. Kerja sama dengan instansi terkait.

Contoh Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)



Kegiatan BKR pada Kecamatan Danau Kembar

4. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS YANG MANDIRI.

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan sektor terkait secara terpadu. Tujuannya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang tentram dan bahagia, serta berfokus pada kemandirian masyarakat dalam memberdayakan sumber daya lokal untuk mengatasi masalah sosial dan kesehatan, seperti *stunting*. Adapun komponen penting yang menyangkut pada Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah sebagai berikut :

- 1. **Pokja Kampung KB:** Adanya Kelompok Kerja (Pokja) yang aktif, terdiri dari tokoh masyarakat, kader, dan pemangku kepentingan desa.
- 2. **Rumah DataKu:** Adanya Rumah Data Kependudukan sebagai pusat informasi dan data keluarga di tingkat desa.
- 3. **Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT):** Pusat kegiatan gizi dan kesehatan untuk mengatasi stunting.
- 4. **Keterpaduan Program:** Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (contoh: Posyandu, BKB, BKR, BKL, PIK-R).
- 5. **Pemberdayaan Ekonomi:** Adanya usaha peningkatan keterampilan (seperti UPPKA) untuk ekonomi keluarga yang lebih baik.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri dan realisasi kinerja tahun ini.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut:

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kampung keluarga berkualitas mandiri	95,5	98,6	103

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indikator Keluarga yang berkualitas yang mandiri dengan target sebesar 95,5 dan terealisasi sebesar 98,6 persen dengan capaian kinerja sebesar 103 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.14
Kampung Keluarga berkualitas mandiri

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Kampung keluarga berkualitas mandiri	NA	NA	98,6	NA	NA	103	100	98,6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kampung keluarga berkualitas mandiri dari target 95,5 dapat tercapai 100 persen dengan capaian kinerjanya 100 persen

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan Strategis (Renstra).

Tabel 3.15
Persentase Kampung keluarga berkualitas mandiri

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Persentase Kampung keluarga berkualitas mandiri	NA	NA	98,6	NA	NA	103	100	98,6

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa pencapai kinerja indikator Kampung keluarga berkuaitas mandiri dimana capaian kinerja 103 persen ini berarti target kinerja nya tercapai dengan baik hal ini disebabkan karena :

1. Ketersediaan anggaran
2. Tersedianya kepengurusan (Pokja) regulasi pendukung (SK) serta sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kampung keluarga berkualitas
3. Aktifnya berbagai kegiatan operasional pokja pertemuan ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL) serta integrasi layanan kesehatan dan pendidikan
4. Tersedianya data kependudukan yang akurat di rumah dataku dan tingginya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya dari Indikator Persentase Kampung Keluarga Berkualitas mandiri dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase Kampung keluarga berkualitas mandiri	95,5	98,6	103	984.756.408	807.924.836	82 %
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						18
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						125,609

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Indikator Persentase Kampung Keluargasa berkualitas pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 95,5 dan terealisasi sebesar 98,6 dengan capaian kinerja sebesar 103 % sedangkan pada anggaran sebanyak Rp.984.756.408,-dan terealisasi sebanyak Rp. 807.924.836 dengan capaian 82% dan terjadi efisiensi sebesar 18% maka didapat efektifitas 125,609 %.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .

1. Pertemuan pokja Kampung Keluarga Berkualitas
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok BKR,BKB,BKL,UPPKA
3. Melaksanakan pelayanan KB safari

5. INDIKATOR KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan terhadap IPM laki –laki. IPG suatu ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia dalam mengungkapkan ketidakadilan pencapaian antara perempuan dan laki-laki, dengan komponen pengukurnya sama dengan pengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak/ekonomi.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Berkisar antara 0-100 persen, semakin tinggi angka IPG atau mendekati 100 dapat dikatakan semakin mendekati kesetaraan atau semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki laki dan perempuan dan apabila IPG diatas 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan diatas laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender dapat diukur dengan formulasi komponen pembentuknya yaitu dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator Pengukur Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025

No.	Indikator	Perhitungan Berdasarkan Jenis Kelamin	
		P	L
1.	Angka Harapan Hidup	74,58	70,56
2.	Rata Rata Lama Sekolah	7,91	7,94
3.	Harapan Lama Sekolah	14,61	12,91
4.	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	10,533	15,292

Sumber data: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian

Berdasarkan data diatas didapatkan:

Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan Dimana Angka Harapan Hidup Perempuan tahun 2025 sebesar 74,58 sedangkan laki-laki sebesar 76,56. Data menunjukan Harapan Hidup laki-laki lebih tinggi daripada AHH perempuan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki Laki dan Perempuan Dimana angka Harapan Lama Sekolah perempuan tahun 2025 sebesar 14,61 sedangkan laki-laki sebesar 12.91 Data menunjukkan Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi daripada HLS laki-laki.

Angka Rata rata Lama Sekolah Laki dan Perempuan Dimana Rata-rata Lama Sekolah perempuan tahun 2025 sebesar 7.91 sedangkan laki-laki sebesar 7.94 Data menunjukkan Rata-rata lama Sekolah Perempuan lebih rendah daripada Rata-rata Lama Sekolah laki-laki.

Pengeluaran Perkapita disesuaikan Dimana Pengeluaran Perkapita perempuan tahun 2025 sebesar 10,533 sedangkan laki-laki 15,292. Data menunjukkan Pengeluaran Perkapita Perempuan lebih rendah daripada Pengeluaran Perkapita laki-laki.

Untuk menentukan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kab. Solok terlebih dahulu dilakukan perhitungan mengukur Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Rasio IPM laki-laki. Perhitungan untuk IPM di tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat di lakukan oleh Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Solok Tahun 2025

No	Wilayah	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-Laki
1	IPM Kab. Solok	70,98	73,77

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan (70,98) masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM laki-laki (73,77). Artinya masih terjadi ketimpangan pembangunan gender di Kabupaten Solok meskipun tidak terlalu signifikan.

Uraikan kondisi/keadaan pada Kabupaten Solok berdasarkan realisasi tahun 2025

Berdasarkan kondisi di Kabupaten Solok, dimana IPM perempuan lebih rendah daripada IPM laki-laki, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dinikmati oleh perempuan masih belum sepenuhnya setara dengan laki-laki, terutama pada beberapa dimensi pembangunan.

Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah perempuan masih sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, akses pendidikan di wilayah tertentu, serta peran domestik perempuan yang masih cukup dominan.

Dalam bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagian besar perempuan bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dan perlindungan kerja yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang lebih produktif.

Selain itu, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, politik, dan kelembagaan masyarakat masih relatif terbatas. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, namun proporsi perempuan dalam jabatan strategis masih perlu ditingkatkan.

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja IPG tahun ini.**

Realisasi pencapaian indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat pada Tabel 3. 14. Dibawah ini :

Tabel 3.14

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisas i	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Gender	96,23	96,22	99,98

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target IPG pada Tahun 2025 pada Renstra 2025-2029 adalah 96,23 dengan realisasi pencapaian 96,22 dengan capaian kinerja 99,98 %.

2. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Pencapaian target indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2025 dan beberapa tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Gender	96,19	96,29	96,17	96,22	99,80	99,80	99,59	99,44

Berdasarkan Tabel. 3.15 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Pembangunan Gender belum tercapai.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	96,19	96,29	96,17	96,22	99,80	99,80	99,59	99,44	96,76	99,44...

Berdasarkan Tabel. 3.26.3 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Pembangunan Gender belum tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks pembangunan gender Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa factor pendukung/penghambat serta solusi yang dilakukan

1. Faktor Penghambat
 - a. Belum sinergi antar OPD Kab. Solok dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilakukan dengan terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kab. Solok Tahun 2025 dan adanya penyediaan serta, pemanfaatan data terpilah gender pada OPD Kab. Solok meskipun belum semua OPD tersedia data terpilah
 - b. Belum sinerginya OPD organisasi wanita di Kabupaten Solok dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan organisasi perempuan.
 - c. Masih kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan terhadap perempuan dalam pengembangan industri rumahan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian perempuan serta rendahnya kesadaran dan kepedulian serta kepekaan perempuan dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.
 - d. Kurangnya kesadaran dan Edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dapat menghambat peningkatan IPG.

Adapun solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
- b. Meningkatkan capaian program dan kegiatan bidang PPA untuk mendukung pembangunan gender baik disektor pendidikan, kesehatan, perekonomian.
- c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pelatihan dan pembinaan pengembangan industri rumahan dalam membantu meningkatkan perekonomian perempuan.
- d. Meningkatkan peran dan kerjasama dengan organisasi organisasi Wanita atau kemasyarakatan dan Lembaga Non Pemerintah yang ada di Kab. Solok dalam pemberdayaan perempuan.
- e. Kurangnya partisipasi perempuan dalam politik. Partisipasi perempuan dalam politik masih rendah sehingga mmbatasi kesempatan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan public.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

e. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender

Untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat pada program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan PPRG bagi Focal Point di Kabupaten Solok yang diikuti oleh Kasubag Perencana se Kabupaten Solok 5 diikuti sebanyak 40 orang di Aula pertemuan kemenag tanggal 7 Mei 2025 dengan dokumentasi



2. Kegiatan Promosi dan advokasi PUG yang dilaksanakan di Bapelitang yang diikuti oleh Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Solok pada tanggal 22 Juni 2025 dengan Dokumentasi



3. Kegiatan pelaksanaan Industri rumahan yang diadakan di Kacamatan dalam

Kabupaten Solok pada Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih dengan diikuti sebanyak 130 orang pada tanggal 29 Oktober 2025 dilaksanakan di Kecamatan Danau Kembar dan tanggal 17 Nofember 2025 dengan dokumentasi



6. **INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)**

Indeks ketimpangan gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

Secara sederhana, IKG mengukur kehilangan (loss) dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara kedua gender tersebut.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dihitung berdasarkan tiga dimensi kunci yang mencerminkan kesejateraan dan peran gender dalam masyarakat.

1. Kesehatan Reproduksi diukur melalui indikator angka kematian ibu dan angka kelahiran pada remaja
2. Pemberdayaan meliputi keterwakilan perempuan dalam parlemen (Legislatif) serta tingkat pendidikan menengah (SMA ke atas) baik laki-laki dan perempuan.
3. Pasar tenaga Kerja dilihat dari tingkat partisipasi angkatan angkatan kerja (TPAK) untuk membandingkan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Ketimpangan Gender	0,40	0,37	105,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Indeks Ketimpangan gender pada tahun 2025 dengan target 0,40 dengan realisasi 0,37 dengan capaian kinerja 105,5 %

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 16
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketimpangan Gender	NA	NA	NA	0,37	NA	NA	NA	105,5 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks Ketimpangan Gender pencapaiannya tahun 2025 pencapaiannya 105,5 %.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Indeks Ketimpangan Gender

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Ketimpangan Gender	NA	NA	0,37	NA	NA	105,5	0,35	98 %

Dari Tabel diatas dapat dilihat pencapain indikator Indeks ketimpangan gender pencapaiannya baik jika dibandingkan dengan target Renstra pencapaiannya 98 %.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian peningkatan produksi padi Kabupaten Solok tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung serta solusi sebagai berikut:

- 1. **Faktor pendukung** tercapainya Indeks ketimpangan Gender adalah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan Reproduksi yang meliputi penurunan angka kematian ibu,penurunan angka kelahiran remaja dan peningkatan akses layanan kesehatan yang merata
 - b) Peningkatan akses pendidikan perempuan
 - c) Peningkatan partisipasi perempuan pada dunia kerja
 - d) Peningkatan pemberdayaan perempuan di politik dimana adanya keterwakilan perempuan di parlemen.
 - e) Kebijakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek termasuk perlindungan hukum bagi perempuan

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk tercapainya Indeks ketimpangan gender adalah sebagi berikut :

- 1) Perberdayaan ekonomi perempuan dengan mengadakan pelatihan industry rumahan
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung kesataraan gender
- 3) Melakukan penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi seperti pelayanan keluarga Berencana.

- 4) Meningkatkan perlindungan hak hak perempuan terutama dari kekerasan
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya dari indeks Ketimpangan Gender.

Tabel : 3.18

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indeks Ketimpangan gender

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Ketimpangan gender	0,40	0,37	105,5	69.987.438	66.229.021	94,62
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						5,38
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						111,498

Berdasarkan Tabel 3.18 diketahui bahwa Indikator Ketimpangan Gender pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 0,40 dan terealisasi sebesar 0,37 dengan capaian kinerja sebesar 105,5 sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 69.987.438 dan terealisasi sebanyak Rp. 66.229.021 dengan capaian 94,62 dan terjadi efisiensi sebesar 5,38 didapat efektifitas 111,498 %

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indeks ketimpangan Gender sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan industri rumahan
2. Melakukan pelayanan keluarga Berencana
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

7. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan dilindungi, mencakup aspek kesehatan,

pendidikan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan maupun eksploitasi.

Tahun 2025 terdapat beberapa kasus perlindungan anak yang ditangani oleh instansi terkait sebanyak 40 kasus anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Kekerasan seksual terhadap anak	25 orang	
2	Kekerasan terhadap anak	15 orang	

Dari tabel diatas terdapat 40 orang anak yang dilayani dengan 2 jenis kasus yaitu 25 orang kasus yang ditangani berupa kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan penganiayaan terhadap anak sebanyak 15 orang .

a. Perbandingan antara target dan relaisasi kinerja tahun ini

Realisasi Indikator Indek perlindungan anak (IPA) pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.19

Indeks Perlindungan anak

N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisas i	Capaian (%)
1	Indeks Perlindungan anak	66,25	65,39	98,70

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Perlindungan Anak sebesar 66,25 dan terealisasi sebesar 65,39 dengan capaian kinerja sebesar **98,70**

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir

Tabel 3.20
Indeks Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Perlindungan anak	62,04	72,54	NA	65,39	NA	NA	NA	98,70

Berdasarkan tabel 3.20 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Perlindungan Anak tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan dan penurunan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2025 dari target 66,25 teralisasi sebanyak 65,39 % .

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)

Dapat dilihat pada tabel 3.21 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Indeks Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Indeks perlindungan anak	72,54	NA	65,39	NA	NA	98,70	66,55	98,25

Berdasarkan tabel 3.22 dapat dilihat bahwa Realisasi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** dan target tahun 2025 adalah sebesar 66,25 sedangkan realisasi sebesar 65,39 untuk capaian kinerja tahun ini adalah 98,70.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks perlindungan Anak tahun 2025 terdapat beberapa faktor **penghambat** serta solusi sebagai berikut:

2. Faktor penghambat tidak tercapai Indeks Perlindungan anak

- a) Masih tingginya kekerasan terhadap anak
- b) Capaian kabupaten layak anak masih tingkat Pratama
- c) Masih kurangnya data dan informasi tentang kasus kekerasan dan eksploitasi anak sehingga sulit untuk mengembangkan program dan kebijakan yang efektif
- d) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melindungi anak-anak dan melaporkan kasus kekerasan dan eksploitasi.
- e) Masih kurangnya akses layanan kesehatan

Adapun solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian :

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan hak hak anak melalui Sosialisasi dan edukasi
- b) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
- c) Meningkatkan layanan kesehatan bagi anak anak terutama di daerah pedesaan.
- d) Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dalam melindungi anak-anak.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

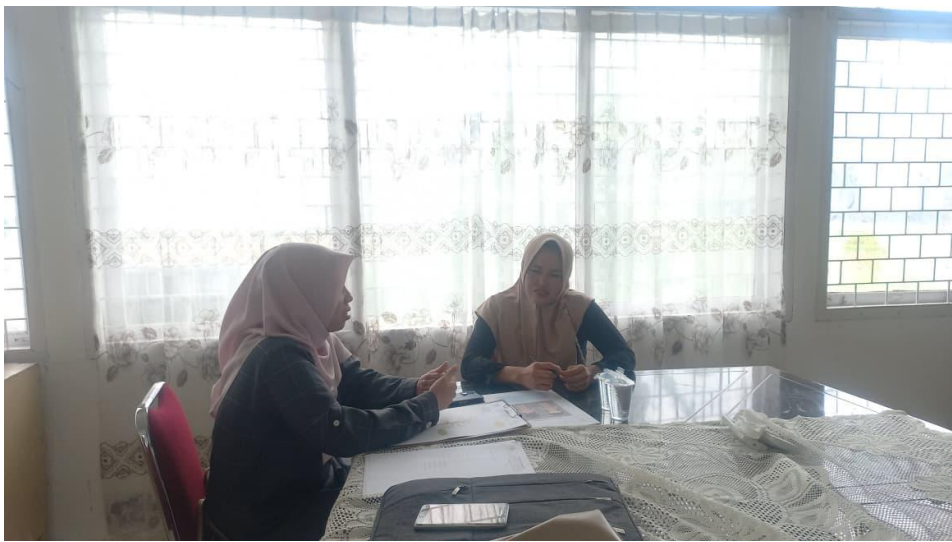
Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indeks Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1. Melakukan penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak

Contoh pada gambar dibawah ini kegiatan penjangkau kasus kekerasan terhadap dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Melakukan pendampingan kasus oleh psikolog contohnya kegiatannya pada gambar dibawah ini :



3.Melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak



3. Melakukan Sosialisasi Kabupaten layak anak



4. Melakukan kegiatan forum anak



B. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021-2026.

Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

B.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021- 2026 Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integratif
- b) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2021-2026.

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kepersertaan ber-KB
- b) Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2021-2026 tetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2 pada 3.3.Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2025

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kepesertaan ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Anak	2.50
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,35
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	%	9,3
		Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	96,67
		Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	%	100
		Skor KLA	Angka	750

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2025 melaksanakan 9 program. Secara teknis program tersebut didukung dengan 22 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis

Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dan capaian Indikator Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel .3.3

Tabel.3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A Tahun 2025

N o	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realiasi capaian 2025	Persentase capaian Tahun 2025	Target 2026 Renstra
1	TFR (Angka kelahiran Total)	2,39	1,68	103	2.50
2	Indek Pembangunan Gender	96,67	96,22	99,53	90,76
3	Persentase kebutuhan ber KB-Yang tidak terpenuhi (Umet-Ned)	10,35	6,04	170	10,20
4	Persentase Perempuan yang produktif dalam ekonomi keluarga	9,3	9,3	100	9.5
5	Persentase perempuan anak korban kekerasan yang di tangani Instansi keluarga	100	100	100	100
6	Skor KLA	750	830	110	800

Dilihat bahwa persentase capaian 6 (enam) indikator Kinerja Tahun 2025btercapai dengan predikat sangat baik

B.2. Perbandingan Realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

MENINGKATKAN KEPESERTAAN BER-KB

Untuk mewujudkan Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepesertaan ber-KB telah ditetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1.Angka kelahiran Total (TFR)
- 2.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmer Need)

1.)Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR)

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Adalah Rata-

rata Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya yaitu antara umur 15 s/d 49 tahun per 1000 Wanita. TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Total Fertility Rate (TFR) merupakan pengukuran terhadap fertilitas dengan cara pengukuran Fertilitas Tahunan melalui jumlah rata-rata Anak yang dilahirkan setiap Wanita Usia Subur. Angka TFR diterbitkan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan bisa didapatkan dari Survey Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dirilis sekali dalam 5 Tahun. Total Fertility rate juga bisa dihitung oleh DPPKB dan P3A dengan menggunakan rumus yang ditetapkan secara baku oleh BKKBN Pusat.

Untuk mendapatkan angka TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Spesific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu,dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 : Total ASFR Kabupaten Solok Tahun 2025

No.	Kelompok Umur wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1.	15-19 Tahun	17.708	141	7.9
2.	20-24 Tahun	18.578	1235	66,47
3.	25-29 Tahun	15,788	1751	110,90
4.	30-34 Tahun	13,159	1226	93,17
5.	35-39 Tahun	13,873	587	42,31
6.	40-44 Tahun	14,348	174	12,13
7.	45-49 Tahun	13.520	8	0,59
	Jumlah	107,109	5122	333,75

Sumber : Dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Rumus Untuk Mencari TFR

$$\begin{aligned} \text{TFR} &= 5 \sum \text{ASFR}_i \\ &= 5 (7,9+66,75+110,90+93,17+42,31+ 12,13+0,59) \\ &= 5 (333,75) /1000 \\ &= 1,68 \quad \leftarrow \quad 2025 \end{aligned}$$

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.3

Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2026
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Anak	2.35	1,68	128,5	2.45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target TFR pada tahun 2025 2,50sedangkan realisasi 1,68 sedangkan capaiannya 103.

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel. 3B.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja TFR Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Angka kelahiran total (TFR)	Jumlah anak	2,65	2,55	2,47	2,35	2,55	2,05	1,79	1,68	119,5	127,5	112	128,5

Dari table diatas untuk indikator angka kelahiran total atau TFR mengalami penurunan setaiap tahunnya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2025 di Kabupaten Solok terjadi penurunan angka kelahiran anak dibandingkan angka kelahiran dengan tahun sebelumnya artinya pencapaian/pelaksanaan pelayanan berjalan lebih baik/sukses.

d. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)

Tabel.3.B5
Angka kelahiran Total (TFR)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1	TFR	2,05	1,79	1,68	119,5	127,5	128,5	2,45	100

Berdasarkan tabel 3.B5 dapat dilihat bahwa Realisasi TFR tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** sebesar adapun penyebab penurunannya karena persentase infratraktur dasar rendah, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) maka capaian kinerja sebesar 100

e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional

Tabel 3.B6
Angka kelahiran Total (TFR)

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten Solok	Provinsi	Nasional
1.	Angka kelahiran total (TFR)	1,68		

e.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian kinerja TFR tahun 2025 terdapat beberapa faktor **pendukung/penghambat** serta solusi sebagai berikut:

- Faktor Pendukung

1. Penggunaan akses Keluarga Berencan di Kabupaten Solok dan penggunaan kontrasepsi yang efektif dapat mengurangi angka kelahiran.
2. Pemahaman PUS tentang ber KB cukup baik,peningkatan pendidikan perempuan dapat meningkatkan kesadaran dan

penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur di Kabupaten meningkat .

3. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau dapat membantu meningkatkan akses Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
4. Dengan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di tingkat Nagari dan Jorong kepada Kader yang dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana setiap bulannya di setiap kecamatan dalam Kabupaten Solok.
5. Adanya Kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan organisasi terkait peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana.

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian TFR pada Tahun ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menggalakkan Program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah akan kelahiran. Dilakukan melalui sosialisasi oleh Kader KB di Nagari dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Kependudukan dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari Laju Pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.
3. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang ber-KB, Hidup Sehat, Melengkapi Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pelaksana Di Lapangan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks Angka kelahiran Total (TFR) dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.B.6
 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
 Indikator Angka kelahiran total (TFR)

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Angka kelahiran Total (TFR)	2.35	1,68	128,5	3.887.845.137.90	3.422.120.166	88
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						22
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						146,022

Berdasarkan Tabel 3.B.6 diketahui bahwa Indikator Angka kelahiran total (TFR)pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 2,35 dan terealisasi sebesar 1,68 dengan capaian kinerja sebesar 128,5 sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 3.887.845.137.90 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.422.120.166 dengan capaian 88 % dan terjadi efisiensi sebesar 22 % maka didapat efektifitas 146,022 %

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung capaian Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Solok Tahun 2025, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1.Pemuktahiran data di wilayah disetiap Kecamatan



- 2. Pelayanan Keluarga Berencana MKJP di Kecamatan Kubung setiap bulannya

Kegiatan pelayanan KB di Kabupaten Solok diadakan di Kecamatan setiap bulannya yang diadakan pada pusat Kesehatan masyarakat, dengan sasarannya PUS (Pasangan Usia Subur). pelayanan KB di Kabupaten Solok dilakukan dengan pemasangan alat kontrasepsi pada PUS contohnya pemasangan Implant di Kecamatan Kubung .



3. Melakukan Mini Loka karya di setiap Kecamatan setiap bulannya dengan peserta TPPS Kecamatan



4. Melakukan pendistribusian alat kontrasepsi ke setiap kecamatan dalam Kabupaten Solok ke Balai Penyuluh untuk di distribusikan ke Puskesmas guna pelayanan KB seperti gambar dibawah ini :



2.).Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin punya anak lagi tetapi belum tahu kapan juga termasuk kelompok ini. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. Tidak terpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan Persentase kebutuhan ber-KB Yang TidakTerpenuhi (Unmet Need) diukur sebagai berikut:

Jumlah PUS (tak KB) iat+tial

Unmet Need =

Jumlah PUS

x 100%

Berikut dapat dilihat dari Tabel dibawah ini Persentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi Unmet Need Kabupaten Solok Tahun 2025.

No	Kecamatan	PUS	PUS Bukan Peserta KB				Unmet-need	%
			Hamil	IAS	IAD	TIAL		
1	Pantai Cermin	3531	0	99	43	59	102	2,89
2	Lembah Gumanti	8105	4	496	247	222	469	5,79
3	Payung Sekaki	1153	0	66	13	32	45	3.90
4	Lembang Jaya	4674	1	232	136	171	307	6.57
5	Gunung Talang	8263	2	400	225	199	424	5.13
6	Bukit Sundi	3236	4	262	97	92	189	5.84
7	IX Koto Sungai lasi	1279	3	89	33	80	113	8.84
8	Kubung	8324	3	410	249	304	553	6.64
9	X Koto Singkarak	3544	1	440	150	202	352	9.93
10	X Koto Diatas	2098	1	190	105	107	212	10.10
11	Junjung Sirih	952	0	65	33	104	137	14.39
12	Hiliran Gumanti	2394	3	110	25	45	70	2.92
13	Tigo Lurah	1652	0	91	23	64	87	5.27
14	Danau kembar	3706	0	323	55	80	135	3.64
Jumlah		52.911	22	3273	1434	1761	3195	6.04

Sumber data dari DPPKBP3A Kabupaten Solok

a. Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Tabel. 3.B.7

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

No	Indikator Kiner	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target Akhir 2026
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,35	6.04	171	10.20

Dilihat dari Tabel diatas dimana Unmeet mengalami penurunan dari Tahun lalu Persentase kebutuhan ber-KB yag tidak terpenuhi (Unmet-Need) bersifat negatif karena semakin kecil pencapaian semakin baik,Tahun 2025 target Unmet-need sebesar 10,35 dengan pencapaian sebesar 6,04 hal ini merupakan pencapaian yang baik jika dibanding Tahun lalu pencapaian Unmet-Need sebesar 9,24 jadi mengalami penurunan sebesar 3,2 % ini artinya capaian kinerja baik.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel .3B.8

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Unmet Need Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi			capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	10,45	10.,40	10,35	11,91	9,24	6.04	87,74	112,5	120

Dari tabel diatas dapat uraikan bahwa pada Tahun 2025 Indikator Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target 10,35 dengan realisasi 6,04 dengan capaian 120 persen ,jika dibandingkan dengan Tahun 2024 pencapaian kinerja meningkat dengan artinya pencapaian kinerja kita tercapai atau baik.

Pada sasaran 1 Meningkatnya kepesertaan ber KB terdapat 2 Indikator Yaitu : angka kelahiran total (TFR) dan indicator Persentase kebutuhan ber-KB (Unmet Need) yang tidak terpenuhi dimana kedua indicator ini bersifat negatif semakin rendah pencapaiannya semakin baik . Berikut dapat dilihat pada table dibawah ini realisasi kinerja serta capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya kepesertaan ber KB Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra

Tabel.3.B9

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1	Persentase kebutuhan ber –KB yang tidak terpenuhi (Un-Meed need)	11,91	9,24	6.04	87,74	112,5	120	10,20	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu .

d.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
e.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Tahun 2025 pencapaian Indikator Unmeet Need mengalami penurunan dari Tahun 2024 dimana pada Tahun 2024 pencapaian Un-meet need 9,24 sedangkan Tahun 2025 pencapaiannya mengalami penurunan 6,04 pencapaian ini baik.

Keberhasilan yang telah dilakukan dengan menurunnya pencapaian Un-meet Need Tahun 2025.

- 1. Dukungan dari pasangan dan keluarga
- 2. Peningkatan akses kemetode kotrasepsi yang efektif
- 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana

Adapun Alternatif Solusi yang Dilakukan untuk penurunan Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

- 1. Peningkatan pembiayaan sarana penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi melalui DAK.

2. Peningkatan peran kelompok (BKB, BKR, BKL) dalam memberikan informasi efek samping, komplikasi dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di DTPK melalui pelayanan pada Balai Penyuluh dan Klinik KB.
4. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Medis.
5. Obat harus terjamin tidak Kadaluarasa.
6. Meningkatkan SDM Masyarakat tentang manfaat KB.

f.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Persentase kebutuhan ber KB yag tidak terpenuhi (Un.Meed Need)dapat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.B.7: Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		%
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	10,35	6,04	171	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.367.141.349.00	2.924.983.577.00	88,11
Rata rata capaian				Total Anggaran	3.367.141.349.00	2.924.983.577.00	88,11
Tingkat Efisiensi							11,89
Tingkat efektifitas							1,940

Pada Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) tingkat efisiensinya sebesar 11,89 dan tingkat efektifitasnya 1,940 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.367.141.349.00,-

h. Analisis Program/Kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Faktor pendukung menurunnya pencapaian dari Un-Meed Need adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan Reproduksi
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ber KB
- c) Adanya dorongan dari keluarga terhadap pentingnya ber KB
- d) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan reproduksi dan keluarga berencana
- e) Adanya ketersediaan alat Kontrasepsi
- f) Peningkatan layanan tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- g) Melakukan penyuluhan tentang mamfaat dari Ber KB.
- h) Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana
- i) Adanya kersama sama dengan Instansi terkait.

SASARAN 2

MENINGKATKNYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Untuk mewujudkan Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepesertaan ber-KB telah ditetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase Perempuan Yang Produktif dalam Ekonomi keluarga
2. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait.
3. Skor KLA.

1.).Indikator Kinerja Persentase Perempuan yang produktif dalam Ekonomi keluarga

Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata Wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan,

sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni "anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.B8.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target Akhir 2026
1	Persentase perempuan produktif dalam ekonomi keluarga	%	9,3	9,3	100	9,5

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 100% dan Realisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan menghitung Perempuan Yang Produktif di Kabupaten Solok seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.b9 Data Industri Rumahan

No	Nagari	Satuan	Realisasi
			2023
1	2	3	4
1	Kecamatan. Danau Kembar	Orang	65
2	Kecamatan Junjung Sirih	orang	65
Jumlah		Orang	130

Capaian Kinerja Persentase 100 Persen. Total Perempuan produktif yang dibina pada tahun 2025 sebanyak 130 orang Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga .Pada tahun 2025 ada 2 Nagari dalam Kecamatan Danau kembar yaitu Nagari Kampung batu Dalam dan Nagari Simpang Tanjung Nan Empat sebanyak 65 dan Kecamatan Junjung Sirih

yang dibina Nagari yaitu : Nagari Paninggahan dan nagari Muara Pingai sebanyak 65 orang.

Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian perempuan dalam keluarga. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pembinaan/pelatihan pengembangan industri rumahan terhadap perempuan produktif di Kab. Solok dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam serta Lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat

Sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat di nagari, dengan perempuan sebagai penggeraknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga Melalui pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari pengembangan industri rumahan ini dilakukan adalah:

1. Melahirkan Industri Rumahan pemula diberbagai peluang kerja baru
2. Meningkatkan pendapatan Keluarga
3. Mengurangi jumlah Asisten Rumah Tanggga (Pembantu Rumah)
4. Mengubah pandangan terhadap perempuan
5. Meningkatkan jumlah perempuan terdidik
6. Menambah ketrampilan perempuan di berbagai bidang ekonomi
7. Meningkatkan pendidikan perempuan miskin
8. Memanfaatkan sumberdaya yang ada

Keberhasilan yang dicapai dari Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif dalam ekonomi keluarga adalah :

- a. Terlaksananya Sosialisasi / Pelatihan tentang Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dengan kegiatan memasak aneka makanan di Nagari-nagari.

- b. Tersedianya dana Anggaran.
- c. Meningkatkan Perekonomian Keluarga.
- d. Membangun Keluarga Sejahtera di Kabupaten Solok dengan sasaran Ibu-ibu Rumah Tangga dan masyarakat.

Dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan pemerintah daerah bekerjasama dengan organisasi Perempuan yang ada di Kabupaten Solok, melalui perpanjangan tangan organisasi perempuan juga memberikan pembinaan/pelatihan terhadap perempuan perempuan produktif yang ada dibawah binaan organisasi perempuan.

b.Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.B10
Persentase perempuan produktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	%	9,3	9	8	9,5	9	8	102	100	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian Persentase perempuan produktif mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini pencapaian kinerja baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2025	2024	2023	2025	2024	2023	Target	Capaian (%)
1	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	9,3	9	8	100	100	100	9,5	97

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 100% dan Realisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

e. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- Faktor pendorong .

Keberhasilan yang dicapai dari Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif dalam ekonomi keluarga adalah :

- a. Terlaksananya Sosialisasi / Pelatihan tentang Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dengan kegiatan memasak aneka makanan di Nagari-nagari.
- b. Tersedianya dana Anggaran.
- c. Meningkatkan Perekonomian Keluarga.
- d. Membangun Keluarga Sejahtera di Kabupaten Solok dengan sasaran Ibu-ibu Rumah Tangga dan masyarakat.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Perempuan Yang Produktif adalah :

1. Lebih meningkatkan kegiatan pelatihan untuk Perempuan Produktif untuk kedepannya dengan sasaran yang merata di setiap Kecamatan.
2. Memberikan solusi bagi Ibu-ibu Rumah Tangga untuk terdaftar di Dinas Koperindag untuk pengembangan hasil Produksi.
3. Pelatihan/Pembinaan pengembangan industri Rumah tangga terhadap Perempuan Produktif di Kecamatan dengan sasaran perempuan produktif.
4. Pembinaan terhadap Organisasi Organisasi Perempuan Kab. Solok.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target indikator dapat dijelaskan sebagai berikut dengan rumus :

Rumus Efisiensi = $100\% - \% \text{Capaian Keuangan}$

$$\text{Rumus Efektifitas} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Capaian Keuangan}}$$

Tabel 3.13: Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indikator Kinerja
 Persentase Perempuan yang produktif dalam Ekonomi keluarga

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		%
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	
Persentase Perempuan yang produktif dalam Ekonomi keluarga	9,3	9,3	100	Peningkatan kualitas keluarga	69.987.438.00	66.229.021.00	94,63
Rata rata capaian				Total Anggaran	69.987.438.00	66.229.021.00	94,63
Tingkat Efisiensi							5,37
Tingkat efektifitas							105

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi 5,37 dari Persentase Perempuan produktif dalam ekonomi keluarga tingkat efektifikatsnya 105 persen dengan anggaran Rp.69.987.438 teralisasi sebanyak Rp.66.229.021 atau 94,63 %

g.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator persentase Perempuan Produktif dalam ekonomi keluarga

Adapun program /kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk pencapaian Indikator persentase perempuan Produktif dalam ekonomi keluarga adalah sebagi berikut :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pengembangan dan Peningkatan Indusri Rumahan Perempuan.
2. Meningkatkan Perekonomian Ibu Rumah Tangga (Industri Rumahan).
 Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan.
3. Melakukan pelatihan indutri rumahan



2.)Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut :
"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor ada lembaga layanan di Daerah (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban

Dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Solok di perkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Pada tahun 2025 dimana terdapat 70 kasus itu terdiri 40 orang kasus kekerasan terhadap anak dan 30 Orang kasus terhadap perempuan .

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.B9
Pencapaian Kinerja Sasaran 2. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Tahun 2025

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Akhir
1	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	%	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan yang ditangani adalah 100%. Sesuai dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani, target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkaitTahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.B.10

No	Indikator kinerja a	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Perse ntase pere mpu an dan anak korb an keke rasan yang ditan gani insta nsi terkai t	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait dilihat dari tahun sebelum mencapai 100 persen sedangkan capaian kinerja 100 % yang ,dimana pada tahun 2025 target 100 % maka pencapaian kinerja nya 100 % ini kinerja tercapai/baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2029 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1	Persentas e perempua n dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100	100

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
e. Analisis penyebab keberhasilan.kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait tahun 2025 terdapat beberapa faktor **pendukung/penghambat** serta solusi sebagai berikut:

- Faktor pendukung

- a) Adanya dukungan anggaran
- b) Dengan melakukan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terjadi pada perempuan dan anak
- c) Adanya layanan dari mitra kerja seperti Polres (Bagian PPA), rumah sakit, Psikolog
- d) Adanya Satgas PPA di setiap nagari
- e) Adanya kerja sama Instansi terkait.

Adapun solusi yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penjangkau kasus terhadap perempuan dan anak
2. Melakukan pendampingan baik oleh Instansi maupun tenaga ahli psikolog
3. Melakukan sosialisasi kekerasan perempuan dan anak yang sasarannya guru Bimbingan Konseling yang ada pada tingkat SMA, SMP, Tokoh masyarakat.
4. Melakukan kegiatan Forum anak di tingkat sekolah.
5. Bekerja sama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan pendampingan Psikolog terhadap perempuan dan anak

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi dan efektif dari penggunaan sumber daya pada kinerja Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani Instansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.B 11

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait

Indikator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait	100	100	100	735.517.316,96	482.318.798	65,57
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						34,43
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						100

Berdasarkan Tabel 3.B.11 diketahui bahwa indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 100 dan terealisasi sebesar 100 dengan capaian kinerja sebesar 100 sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 735.517.316.96 dan terealisasi sebanyak Rp. 482.318.798 dengan capaian 65,57 dan terjadi efisiensi sebesar 34,43 % maka didapat efektivitas 100 %.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait

Program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 untuk mencapai kinerja Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani perempuan dan anak adalah sebai berikut :

1. Melakukan Penjangkauan kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
2. Melakukan pendampingan kasus terhadap perempuan dan anak.
3. Melakukan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Melakukan pembinaan kepada kelompok kegiatan forum anak.

3.).Indikator Kinerja Skor KLA

Kabupaten Solok berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat

dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on the right of the child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada wilayah kabupaten solok. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyebaran informasi dan diseminasi tentang pemenuhan hak anak kepada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, media dan dunia usaha lingkup kabupaten solok sekaligus meningkatkan inisiasi terhadap program KLA dan berupaya untuk meraih kategori KLA.

Selanjutnya juga untuk memberikan KIE terhadap organisasi dan komunitas anak (forum anak) sebagai lembaga pelopor dan pelapor, wadah penyaluran aspirasi dan hak-hak anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan wawasan anggota/pengurus forum anak terhadap hak-hak anak sesuai KHA sehingga mampu menyuarakan aspirasi yang merupakan perwakilan dari seluruh anak Kabupaten Solok.

Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu, 1) jumlah anak di kabupaten solok sekitar sepertiga dari total penduduk, 2) anak merupakan modal dari investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, 3) anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan, 4) koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan. Pencapaian Indikator Skor KLA untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.B.12 sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Skorevel KLA Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target Akhir 2026
1	Skor KLA	Angka	800	830	103	800

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, nilai (skore) evaluasi indikator - indikator Skor KLA Kabupaten Solok dimana capaian Skore KLA pada penilaian tahun 2025 adalah 830.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Skor KLA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator kinerja	Satuan	Target			Realisasi			capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Skor KLA	angka	700	800	800	734,50	803	830	103	114,7	103

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025, nilai (skore) evaluasi indikator - indikator Skor KLA Kabupaten Solok dimana capaian Skore KLA pada penilaian tahun 2025 adalah 830 angka jika dilihat dari tahun sebelumnya pencapaian KLA dari Tahun 2023 dengan angka 734,50 mengalami peningkatan pada Tahun 2024 803 angka dan tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 830 angka.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja KLA sampai tahun ini dengan Target jangka menengah Renstra

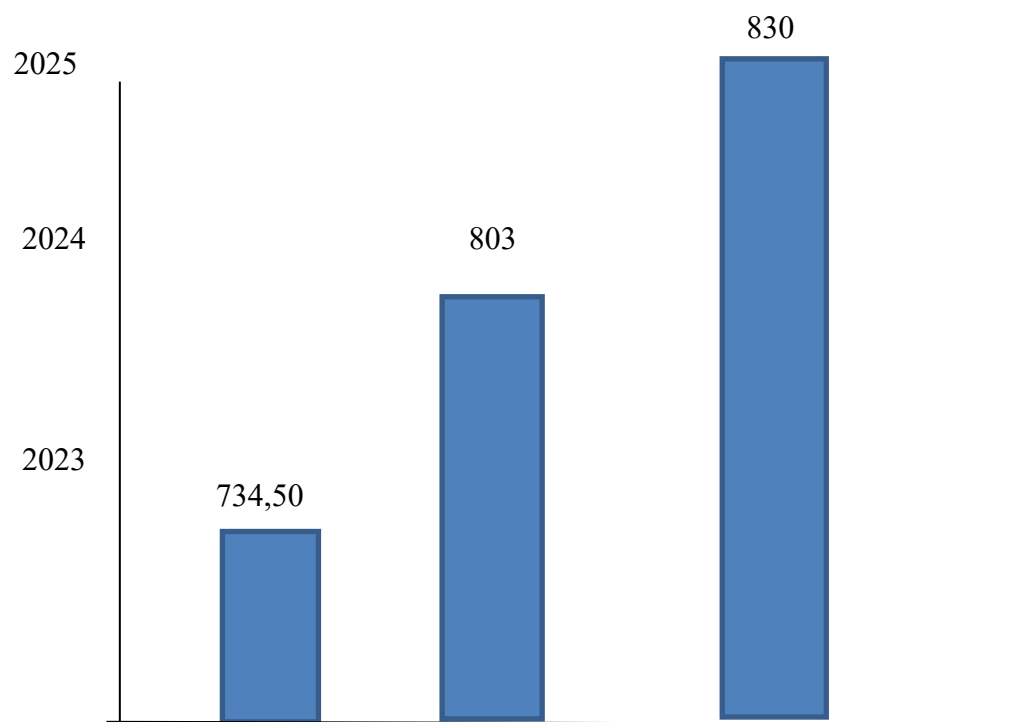
Perbandingan realisasi Kinerja KLA sampai tahun ini dengan target jangka menengah Renstra dapat dilihat dari Tabel 3 B.13

Tabel 3B.13
Indikator KLA

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RENSTRA)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	Target	Capaian (%)
1.	Skor KLA	734,50	803	830	103	114,7	103	800	100

Dari tabel diatas pencapaian indikator KLA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan target Renstra 2026 pencapaiannya telah mencapai 100 persen. Ini berarti pencapaian Indikator KLA baik. Adapun pencapaian KLA di gambarkan dengan Grafik sebagai berikut :

**PENCAPAIAN
GRAFIK KLA**



- d.Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2025 indikator Skor KLA mangalami peningkatan dari Tahun 2024,meskipun demikian untuk meraih atau meningkatkan Skor KLA kabupaten Solok perlu dilakukan upaya-upaya yang melibatkan Instansi Pemerintah,Swasta,Media masasa dan masyarakat antara lain:

Meskipun demikian untuk meraih atau meningkatkan Skor KLA Kabupaten Solok, perlu terus dilakukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh

Lembaga Instansi Pemerintah, Swasta, Media Massa dan Masyarakat antara lain :

-Faktor Pendukung

1. Tersedia Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia Sumber Daya manusia terlatih
3. Implementasi KHA (Konvensi Hak Anak) dan mampu menerapkan Hak Anak dalam kebijakan, Program dan Kegiatan.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Level KLA adalah :

1. Menyediakan Anggaran yang mencukupi untuk Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia data anak terpilah : Jenis Kelamin dan Umur Pemenuhan Hak Anak
3. Membangun system kebijakan KLA,Pemerintah daerah membangun system kebijakan KLA yang Komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua Stakeholder terkait
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai tujuan KLA
5. Meningkatkan Trasparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan KLA
6. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk mendukung KLA

g.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator KLA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 3.B 14
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas KLA

Indik ator	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
KLA	800	830	103	83.396.089	69.533.893	83,37
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						16,63
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						123

Berdasarkan Tabel 3.B.14 diketahui bahwa Indikator Indeks KLA pada Tahun 2025 target kinerja sebesar 800 dan terealisasi sebesar 830 dengan capaian kinerja sebesar 103 % sedangkan pada anggaran sebanyak Rp.

83.396.089 dan terealisasi sebanyak Rp. 69.533.893 dengan capaian 83,37 % dan terjadi efisiensi sebesar 16,63 % maka didapat efektifitas 123 %

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk mencapai target Indikator sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan tugas KLA dan OPD terkait untuk memenuhi indikator indikator yang ditetapkan sesuai dengan instrument data yang dibutuhkan
2. Melakukan sosialisasi tentang KLA mulai dari tingkat Kabupaten Kecamatan dan Nagari
3. Melibatkan unsur masyarakat dan partisipasi anak baik melalui usulan kegiatan maupun penyusunan aspirasi anak.
4. Komitmen Politis KLA.
5. Optimalisasi Peran Gugus Tugas KLA.
6. Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
7. Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
8. Pemantauan dan Evaluasi KLA Secara Berkelanjutan

C. REALISASI ANGGARAN.

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai anggaran sebesar Rp. **11.378.474.659,-** (*Sebelas Milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**9.904.257.168,-** (*Sembilan Milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) atau 87,05 % dengan 9 Program diantara nya adalah :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
- 3) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 4) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- 5) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
- 6) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- 7) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
- 8) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
- 9) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Berikut adalah realisasi anggaran Pada Tahun 2025 dari Program Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 3.C.1

Tabel. 3.C1

Realisasi Anggaran Program Kegiatan/Sub.Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi	%
1	2			
	BELANJA LANGSUNG	11.378.474.659	9.904.257.168	87,04
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	4.646.244.507,34	4.027.145.862	95,98
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.707.210	58.529.486	93,07
1.	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.454.085	49.750.080	93,07
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.664.244.767.29	3.199.161.583.	77,65
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.630.911.479,29	3.176.572.766	87,53
3	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.333.288	22.588.817	67,77
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.215.573.05	205.298.841	89.59
4	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/	2.162.750	2.162.750	100,00

	Penerangan Bangunan Kantor			
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.135.625	19.440.000	87,82
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.185.682	30.425.115	86,47
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.520.012	10.920.310	80,77
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.211.504.05	142.350.666	92,91
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.035.693	37.886.160	84,24
9	Sub.Kegiatan Penyediaan surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	54.255.693	20.126.160	37,10
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.980.000	14.960.000	99,87
12.	Sub Kegiatan Jasa pelayanan umum kantor	1.800.000	1.800.000	100,00
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	621.041.264	526.269.792	85,57
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	343.628.652	267.539.840	77,86
14.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.412.612	258.729.952	93,27
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.618.000	40.969.820	93,93
6	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	43.618.000	40.969.820	93,93

	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
15	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43.618.000	40.969.820	93,93
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	735.517.361,96	482.318.794	79.58
7	Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.589.000	8.160.000	95.01
16	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	8.589.000	8.160.000	95.01
8	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	105.433.204	68.987.726	65.43
17.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lajutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	105.433.204	68.987.726	65.43
9.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	621.495.157,96	405.171.068	65.43
18	Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas sumber daya Lembaga penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.457.534,26	32.051.825	93.02
19.	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	567.037.623.70	373.119.243	63.56
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	69.987.438	66.229.021	94,43
10.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	69.987.438	66.229.021	94,43

	mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
20	Sub.Kegiatan Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	69.987.438	66.229.021	94,43
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83.396.089	69.533.839	83,37
11.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	53.036.089	45.801.999	86,36
21	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	53.036.089	45.801.999	86,36
12	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	30.359.555	23.731.840	78.17
22	Sub.Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	30.359.555	23.731.840	78.17
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	283.696.125	241.700.720	85.20
13.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah kabupaten/Kota	92.911.000	92.274.000	99.31
23	Sub.Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	92.911.000	92.274.000	99.31
14.	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.235.999	117.403.230	75.14
24	Sub.Kegiatan Koordinasi Pelayanan AMPK	156.235.999	117.403.230	75.14
15	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan	34.549.126	32.023.490	92.69

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota			
25	Sub.Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34.549.126	32.023.490	92.69
VII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	520.703.788,90	497.136.594	96,69
16.	Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	183.684.592	175.807.540	95.71
26.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Kependudukan Jalur Pendidikan formal sesuai isu Lokal Kabupaten/Kota	183.684.592	175.807.540	95.71
17.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	337.019.196	321.329.054	90.74
27	Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan system Informasi Keluarga	60.000.000	58.743.576	97,90
28.	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	18.759.196	13.811.006	73,62
29.	Sub.Kegiatan Pencatatan dan Pegumpulan Data Keluarga	76.800.000	76.800.000	100,00
30.	Sub.Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	168.000.000	160.259.054	95.39
31.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	13.460.000	11.715.418	87.03
VIII.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.367.141.349	2.924.983.577	88,11
18.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.305.875.125	1.179.348.724	88,72
32.	Sub.Kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan bangsa Kencana	686.000.000	654.238.900	95,37
33.	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi	279.180.000	229.806.000	82.31

	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
34.	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	115.516.788	92.42
35	Sub.Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.695.125	14.238.036	90.72
36	Sub.Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	165.547.000	82.77
19.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.076.509.816	937.710.017	93.57
37.	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000	24.206.190	99.61
38.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	994.159.816	858.493.863	86,35
39	Sub.Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.050.000	55.009.964	94.76
20	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	984.756.408	807.924.836	82.04
40	Sub.Kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	984.756.408	807.924.836	82.04
IX.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.628.169.999	1.554.238.941	95,41
21.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	301.929.999	233.105.582	79.12
41.	Sub.Kegiatan Promosi dan	37.529.999	31.589.582	84.17

	Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua Hebat,Generasi Berencana,kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga			
42	Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	129.415.000	99.55
43	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.326.239.999	1.321.133.359	96.89
44	Sub,Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pergerakan operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	32.639.999	29.693.359	90,97
45	Sub.Kegiatan Pemantauan data dan infromasi keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja,calon pengantin calon PUS,ibu hamil pasca salin/salin kelahiran,baduta/balita)	588.000.000	588.000.000	100
46	Sub.Kegiatan Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin,PUS ibu hamil,Pasca salin/kelahiran Baduta/balita)	705.600.000	703.440.000	99,69
	Jumlah	11.378.474.659	9.904.999.668	97,05

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 10 Program dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat

dilihat dari realisasi anggaran berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPKBP3A, menunjukkan tingkat keberhasilan Capaian Kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100% (Sangat Baik) : 2 Indikator;
- b. Capaian 76% sampai 100% (Baik) : 3 Indikator
- c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : Tidak Ada Indikator;
- d. Kurang dari 55% (Kurang) : Tidak Ada Indikator.

Sedangkan Alokasi Anggaran pembiayaan Program/Kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2024 sebesar Rp. **11.378.474.659** terealisasi Rp. **9.904.999.668** dengan penyerapan sebesar 87.05

4.2. Strategi di Masa Mendatang

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dengan mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan Staf agar lebih berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberdayakan kader KB

1. seperti PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ agar lebih maksimal dalam mengelola program KB di lapangan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.
2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan DAK.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait aksffcan dilakukan dengan intensif, mengingat pencapaian target indikator hanya dapat diraih melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan manajemen bagi petugas dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan.
6. Mengupayakan Penambahan tenaga Penyuluh Lapangan.

Koto Baru, Februari 2026

Kepala DPPKBP3A



dr.Maryeti Marwazi.Mars

NIP: 19671017 200212 2